

## **Analisis Dampak Konflik Disintegrasi Terhadap Nasionalisme Bangsa Indonesia**

Muhammad Dani Putra Wijaya  
Universitas Moch. Sroedji Jember  
daniwijaya280302@gmail.com

Rhesty Panca Mei Saputri  
Universitas Moch. Sroedji Jember  
rhestysaputri@gmail.com

Agus Danugroho  
Universitas Moch. Sroedji Jember  
agusdanu@umsj.ac.id

**Abstrak:** Tulisan ini menganalisis konflik disintegrasi nasional dan bagaimana dampaknya terhadap nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dalam menjaga keutuhan suatu bangsa karena pada dasarnya merupakan ideologi nasional yang mengajarkan cinta tanah air dan rakyat. Dapat diketahui bahwa nasionalisme Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar seperti seringnya terjadi KKN yang tersebar di seluruh tanah air, masuknya budaya asing yang tidak terkendali, serta hilangnya kepercayaan terhadap bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan baik dari segi tantangan maupun perkembangannya dibandingkan dengan masa lalu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa nasionalisme dapat diwujudkan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Pada awalnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang diyakini akan cenderung menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Banyak ideologi yang telah ada di negara ini yang sudah mendapatkan dukungan masyarakat. Interaksi antar orang-orang yang berbeda etnis, agama dan kelas mudah dijalin. sangat berkaitan dengan pemahaman tentang perbedaan pendapat satu sama lain, sebagaimana ditunjukkan oleh kerjasama antar suku yang berbeda yang dapat dengan mudah dilakukan dengan pertimbangan rasional. Namun fenomena keruntuhan yang dimulai pada level akar rumput membuat takjub. Simpulan dalam tulisan ini adalah nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara.

**Kata kunci:** disintegrasi; konflik; nasionalisme.

**Abstract:** *This paper analyzes the national disintegration conflict and how it impacts nationalism. Nationalism is very important in maintaining the integrity of a nation because basically it is a national ideology that teaches love for the motherland and the people. It can be seen that Indonesian nationalism is currently facing big challenges such as the frequent occurrence of KKN which are spread throughout the country, the uncontrolled entry of foreign cultures, and the loss of confidence in the nation and its own country. The nationalism of the Indonesian people is currently experiencing changes both in terms of challenges and development compared to the past. The method used in this research is descriptive qualitative. In this case, researchers interpret and explain the data obtained by researchers from interviews, observation, documentation, so as to get answers to problems in detail and clearly. The results of this paper show that nationalism can be realized according to the abilities of each individual. Initially, the ideology of Pancasila as the basis of the state with the motto Bhineka Tunggal Ika was believed to tend to unite existing differences. There are many ideologies that already exist in this country that have received public support. Interaction between people of different ethnicities, religions and*

*classes is easy to establish. is closely related to the understanding of differences of opinion with each other, as shown by the cooperation between different tribes which can be easily carried out with rational considerations. But the phenomenon of collapse that starts at the grassroots level is astonishing. The conclusion in this paper is nationalism as an assessment or evaluation of the love for the homeland and the nation for awareness and responsibility as citizens.*

**Keywords:** *disintegration; conflict; nationalism.*

## **PENDAHULUAN**

Secara garis besar, nasionalisme Indonesia telah melalui berbagai proses dan beberapa tahapan yang diawali dengan perjuangan Kartini untuk pembebasan menghadapi tradisi yang diyakini menghambat perempuan pada era itu. Kartini sering digolongkan sebagai pejuang wanita, namun dalam tindakan Kartini memasuki tahap paling awal pembentukan nasionalisme Indonesia. Langkah selanjutnya adalah pembentukan Organisasi Nasional yang menandai kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah komitmen Indonesia sebagai bangsa melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945.

Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: nasionalisme pra-kemerdekaan, nasionalisme pasca-kemerdekaan, dan nasionalisme pasca-reformasi. Setiap situasi tentu menimbulkan masalah yang berbeda bagi nasionalisme (Darmodihardjo & Santiaji, 1981). Misalnya, pada masa sebelum kemerdekaan, persoalan yang dihadapi negara adalah mewujudkan cita-cita persatuan sebagai negara kesatuan dan mencapai kemerdekaan. Di sisi lain, nasionalisme pascaproklamasi menyesuaikan tekanan nasionalis dengan tantangan nasional. Kebhinekaan, terutama yang berkaitan dengan integrasi dan konflik dalam suasana sosial politik Indonesia, merupakan istilah yang problematis. Tidak hanya mencerminkan labirin masalah permukaan, tetapi juga menyembunyikan simpanan emosional yang sangat eksplosif, tetapi tidak dapat menghilangkan inti masalahnya (Saryani, 2013).

Beberapa contoh kerusuhan yang berkepanjangan adalah bukti nyata betapa sistematis dan canggih upaya yang dilakukan untuk menggeser ruang tematik dari horizontal murni menjadi vertikal, tidak hanya individu, kelompok etnis, kelompok agama, kelompok berdasarkan kelompok tertentu, tetapi juga komunitas kita sebagai sebuah bangsa. Tingkatan pandangan pendidikan sangat berbeda sehingga interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, agama dan golongan dapat dengan mudah tercipta pada tingkat elite (Bahri, 2015). Namun, pada tingkat “akar rumput”, membangun konvergensi antara kelompok etnis dan agama yang berbeda tidaklah mudah, dan bahkan jika itu (sudah terbentuk), kenyataan seperti itu tidak akan memungkinkan intervensi negara. tradisi. Itu tidak banyak mempengaruhi mereka. Dalam konteks demikian, integrasi dan konflik merupakan bagian dari kehidupan bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dengan mudah.

Ancaman dan persoalan sulit yang dihadapi Indonesia saat ini berpotensi menggoyahkan stabilitas negara, sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat saat ini. Jika penyelesaian tidak segera tercapai, maka akan berdampak pada konflik yang semakin intensif dan bertujuan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi semacam ini dapat menjadi fenomena atau konflik berkepanjangan yang pada akhirnya mengakibatkan perpecahan bangsa dan juga dipengaruhi oleh mudarnya rasa nasionalisme masyarakat. Hal ini terjadi sebagai

akibat dari nuansa gagasan negara, yang merupakan wilayah geografis di mana seseorang dilahirkan. Bangsa yang dicirikan oleh fakta-fakta biologis ke dalam aspek historis, struktural, teritorial komunitas budaya.

Alasan yang sebagian besar telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Di antaranya adalah Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan hukum, Wawasan Nusantara sebagai landasan visioner, dan Ketetapan MPR No. V/MPR/200 tentang Pemantapan Persatuan dan Persatuan Nasional. Tak perlu dikatakan bahwa tindakan dan rencana harus dikembangkan untuk melawan dan menghindari ancaman disintegrasi bangsa, dan penting untuk memahami faktor-faktor apa yang bertanggung jawab atas ancaman disintegrasi bangsa yang sedang terjadi saat ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan langkah ilmiah untuk memperoleh data. Suatu langkah ilmiah harus berpedoman pada ilmu pengetahuan untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penjournalan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Sugiono, 2015). Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Peneliti menggunakan perspektif partisipan sebagai contoh untuk mendapatkan hasil penelitian. Tujuan utama dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan berfokus pada gambaran besar dari fenomena yang diteliti daripada memecahnya menjadi variabel-variabel yang relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mengartikan Disintegrasi Bangsa**

Disintegrasi adalah keadaan kekacauan yang menghilangkan keutuhan atau kesatuan dan dapat menimbulkan perpecahan. Kebalikan dari disintegrasi adalah persatuan, yang membawa kesatuan dan kohesi menjadi utuh (Widiatmoko & Fahmi, 2017). Disintegrasi dapat berupa demonstrasi, kerusuhan lokal kelompok atau individu yang merasa terdiskriminasi, perilaku kriminal yang tidak tertib, perilaku menyimpang, agama, suku, selera, dan konflik antargolongan (SARA). Fenomena keruntuhan sosial merupakan contoh fenomena yang paling ditakuti dalam kehidupan bermasyarakat (Danugroho, 2020). Hal ini karena keruntuhan dapat menyebabkan pergolakan dalam rangkaian celah. Maka berdasarkan hal tersebut, usahakan untuk menghindari atau mengatasi berbagai jenis keruntuhan agar tidak menimbulkan perpecahan (Ash-shidiqqi, 2021).

Runtuh adalah gambaran situasi di mana tidak ada aturan atau keseragaman yang berlaku untuk kehidupan sosial (Mulyo & Sigyanto, 2015). Situasi demikian dapat mengancam munculnya perpecahan yang berujung pada rusaknya tatanan sosial yang disebabkan oleh runtuhnya tatanan sosial. Jadi, secara umum disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi sosial, ada pandangan tentang kohesi dan kohesi. Perkembangan kehidupan yang dialami dalam masyarakat seringkali diubah oleh kondisi dan faktor yang menyebabkan perubahan sosial (Ash-shidiqqi, 2020). Keruntuhan juga dapat diartikan sebagai bentuk perilaku individu atau kelompok yang hidup dalam kekacauan. Penyebab keruntuhan tersebut dapat berupa

perubahan sosial yang berlangsung terus-menerus yang terjadi di segala aspek kehidupan, seperti hilangnya kontrol sosial dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Berikut beberapa pendapat para ahli tentang definisi disintegrasi.

1. Soekanto berpendapat bahwa disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam masyarakat dalam situasi ketidakaturan, hal ini didasari pada mudahnya nilai dan norma yang telah hilang. Ada pula faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disintegrasi yaitu perubahan sosial, lembaga sosial yang melalui perubahan karena terjadi sikap serta tuntutan hidup manusia yang terus berkembang dari waktu ke waktu.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disintegrasi merupakan realitas sosial yang menunjukkan adanya ketidak bersatuan, karena keadaan yang terpecah belah dan menyebabkan hilangnya keutuhan dalam hidup.
3. Menurut Webster's New Encyclopedic Dictionary, disintegrasi merupakan suatu perpecahan yang terjadi pada bangsa dan negara hingga pada akhirnya menjadi bagian yang saling terpisah atau berbeda.
4. Mohammad Ali Al Humaidy berpendapat bahwa disintegrasi sosial merupakan suatu proses dalam interaksi masyarakat majemuk, di mana ada satu atau beberapa kelompok yang berupaya untuk menanggalkan identitasnya sendiri serta melakukan suatu tindakan diskriminasi pada pihak lain, sebab pihak lain dianggap tidak mengamalkan nilai-nilai yang dianggap benar.

Secara umum, ada tiga bentuk dari disintegrasi, berikut penjelasan bentuk-bentuk dari disintegrasi.

1. Disintegrasi Sosial

Bentuk keruntuhan pertama adalah keruntuhan sosial, tidak berfungsinya norma dan fungsi sosial. Situasi keruntuhan sosial dapat disebabkan oleh orang-orang yang tidak puas dengan kondisinya dan karena itu ingin berubah secara radikal. Contoh dari disintegrasi sosial adalah kekacauan yang terjadi Papua yang biasa dijuluki dengan OPM, disana terjadi kerusuhan baku tembang antar masyarakat dengan aparat keamanan yang menimbulkan banyak korban.

Ada perbandingan pendapat mengenai tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, rakyat Indonesia bercita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, tetapi ketika kota dan provinsi membentuk negaranya sendiri, pasti terjadi disintegrasi sosial. norma yang ada dalam masyarakat mulai ditinggalkan atau tidak berfungsi selayaknya. Salah satu contohnya adalah masalah hukum Indonesia tentang penegakan hukum yang tidak adil (Głab, 2018). Ada kontradiksi antara norma-norma yang ada di masyarakat. Biasanya terjadi pada tingkat RT atau RW. Misalnya, jika berbicara tentang alkohol, beberapa orang menganggap minuman itu buruk, sementara yang lain menentangnya. Penjatuhan sanksi bagi pelanggar KUHP bersifat immaterial. Hal ini terkait dengan penyebab lain, seperti menghukum orang yang korup dan orang biasa dengan perbedaan yang menyebabkan disintegrasi sosial. Penyebab utama disintegrasi sosial adalah perilaku warga negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan merupakan hambatan bagi perubahan sosial dan budaya.

Lalu bagaimana keruntuhan sosial ini dapat dicegah? Tentu saja negara dan masyarakat ingin mencegah atau menghindari segala bentuk keruntuhan, termasuk keruntuhan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah berikut diperlukan.

- a. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan tidak diperdebatkan secara terbuka. Hukum harus benar-benar setia kepada mereka yang melanggar hukum. Pelanggar hukum pantas dihukum, meskipun mereka tinggi dan berkuasa.
- b. Rasa nasionalisme perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan dalam diri seseorang. Karena dengan tumbuhnya nasionalisme masyarakat, maka anggota masyarakat juga menganut segala norma yang ada. Apalagi dengan tumbuhnya rasa nasionalisme, massa menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk diikuti atau dijadikan acuan dalam masyarakat.
- c. Hukum yang berlaku di masyarakat harus sesuai dengan undang-undang dasar 1945
- d. Rasa toleransi terhadap agama, suku dan budaya. Seperti diketahui, Indonesia memiliki penganut agama, suku, dan budaya yang beragam. Oleh karena itu, semua masyarakat harus saling menghormati perbedaan yang ada dan menghindari perpecahan karena perbedaan
- e. Setiap warga negara wajib melakukan integrasi nasional dengan maksimal

## 2. Disintegrasi Bangsa

Bentuk keruntuhan kedua adalah keruntuhan negara, fragmentasi kehidupan sosial oleh pengaruh negara lain. Kemunduran ini juga bisa disebabkan oleh pengaruh negara itu sendiri. Contohnya adalah ketidakmampuan masyarakat untuk menerima perbedaan sehingga menimbulkan sikap diskriminatif. Sebelum keruntuhan budaya terjadi, keruntuhan komunitas biasanya terjadi terlebih dahulu. Kebingungan muncul dari perbedaan pendapat, norma sosial, perbedaan nilai, dan perbedaan perilaku dalam masyarakat (Amaliyah, 2015). Jika gejala tersebut tidak terselesaikan atau tidak segera terselesaikan, maka akan menimbulkan konflik sosial-keruntuhan budaya. Secara umum, keruntuhan ini ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain kelompok, sistem sosial, sistem sanksi, dan sistem perilaku.

## 3. Disintegrasi Keluarga

Bentuk disintegrasi yang ketiga adalah yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan disebabkan oleh kurangnya pengertian antar anggota keluarga. Bentuk disintegrasi ini dapat dilihat dalam berbagai kasus, seperti pisah ranjang antara suami dan istri, perselingkuhan, atau perceraian (Rahmatullah, 2017). Contoh lain dari disintegrasi keluarga adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, sikap anak terhadap orang tuanya, kurangnya hubungan kekerabatan dalam keluarga, kurangnya kelancaran komunikasi dalam keluarga, kurangnya pendapatan suami untuk keluarga, Orang tua, anak, atau anggota keluarga yang terlalu sibuk dengan pekerjaan untuk merawat anggota keluarga, masalah yang

dihadapi dalam hubungan intim, perilaku egois. Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya disintegrasi antara lain adalah sebagai berikut ini.

- a. Konflik, konflik menjadi satu hal yang melatar belakangi terjadinya disintegrasi. Rasa tidak puas terhadap keadaan yang terjadi di masyarakat membuat masyarakat tidak lagi berada dalam rasa persatuan.
- b. Peperangan juga masuk kedalam faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Entah itu peperangan antar suku, etnis, golongan, maupun peperangan yang terjadi karena adanya perbedaan budaya. Peperangan ini menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap persatuan bangsa dan menyebabkan terjadinya disintegrasi.
- c. Kesenjangan sosial juga faktor yang menyebabkan terjadinya disintegrasi. Hal ini terjadi karena seseorang dibedakan berdasarkan status sosialnya.
- d. Kurangnya penghargaan terhadap keberagaman yang bersifat heterogen.
- e. Kurangnya toleransi yang terjadi antar umat beragama
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap segala bentuk ancaman dari luar.
- g. Berkembangnya ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi bangsa
- h. Adanya golongan masyarakat yang tidak mengikuti peraturan baik itu aturan daerah maupun negara dengan baik dan benar
- i. Memudarnya rasa kepercayaan rakyat pada pemimpin dan pengelola negara.
- j. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat sudah tidak berdasarkan Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara.
- k. Tercipta suasana politik yang tidak sehat serta tidak kondusif, sehingga memecah belah masyarakat.
- l. Meningkatnya sikap apatis serta egois dari masyarakat.
- m. Tidak meratanya pendidikan, pembangunan dan bidang lainnya di beberapa wilayah tertentu.

Lantas apa dampak dari keruntuhan yang terjadi? Disrupsi, baik sosial, budaya maupun kekeluargaan, setidaknya memiliki dua konsekuensi besar. Ini penjelasan lainnya. Contoh dari kasus disintegrasi yang menyebabkan perpecahan adalah kasus yang terjadi antara Korea Selatan dan Korea Utara. Yang pada mulanya kedua negara ini bersatu, akan tetapi karena adanya perbedaan dari segi pemerintahan sosialis serta demokratis sehingga menyebabkan kedua negara ini saling bersebrangan bahkan sampai terjadi peperangan untuk memperkuat pengaruh satu sama lain (Danugroho, 2022). Disintegrasi akan membuat keadaan masyarakat menjadi tidak bersatu dan pada akhirnya mengakibatkan perpecahan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ada beberapa contoh kasus disintegrasi, contohnya seperti pemberontakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat pada pemerintahan yang dipimpin oleh orde baru di tahun 1998.

## **Persoalan Disintegrasi Bangsa Indonesia**

Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasional yang mempunyai peranan dan fungsi penting. Dalam pengelolaannya kawasan perbatasan negara tersebut yang meliputi perbatasan darat, laut dan pulau-pulau kecil terluar telah diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdiri dari wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terdapat di dalamnya. Indonesia mempunyai perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sedangkan di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu: India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini. Maka dari itu peran Badan Geologi sangat strategis dalam mengelola wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengingat batas wilayah darat dan dasar laut adalah bagian dari bumi, maka tak bisa dipungkiri peran Badan Geologi sangat dibutuhkan untuk mendapatkan data-data geologi. Keseluruhan data tersebut selanjutnya digunakan untuk memetakan karakteristik lingkungan fisik permukaan bumi terkait tapal batas negara, menentukan potensi SDA di kawasan perbatasan baik batas darat maupun dasar laut, dan untuk mengkaji infrastruktur guna peningkatan ekonomi wilayah perbatasan. Kali ini saya akan membahas tentang ancaman keamanan nasional di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi laut yang sangat luas. Jalur perdagangan melalui laut masih menjadi tumpuan utama para pedagang karena dipandang paling efektif dibanding jalur lainnya (Haboddin & Rahman, 2013). Laut juga memiliki keanekaragaman sumberdaya alam yang sangat beragam, baik hayati maupun non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang besar pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, minyak, gas bumi, dan mineral, selain itu laut juga dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata (Fisher & et al, 2000).

Keanekaragaman sumber daya laut mengakibatkan semua negara bahkan individu ingin selalu mengeksploitasi laut, akibatnya wilayah laut tidak selalu aman dari ancaman kejahatan. Temuan penelitian mengatakan bahwa terdapat 4 potensi ancaman yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara Filipina. Keempat potensi ancaman itu ialah Illegal Fishing, Human Trafficking, penyelundupan, narkoba, dan imigran gelap. Dari ke empat potensi tersebut yang sering terjadi di perairan Indonesia adalah illegal fishing dan imigran gelap. Sebenarnya permasalahan illegal fishing sempat berkurang pada saat Ibu Susi Pudjiastuti menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, sementara kalau tentang imigran gelap sering terjadi dikarenakan kebanyakan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau dekat negara Filipina mempunyai hubungan kekerabatan dengan mereka yang tinggal di Filipina.

Miangas adalah bagian terluar dari pulau yang ada di Indonesia lebih tepatnya terletak di dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Untuk menjangkau Pulau Miangas, jarak yang di tempuh dari kota Bitung sekitar 493 KM dan menempuh perjalanan laut ( $\pm 2,5$  jam) dan melanjutkan perjalanan ke Pulau Tahuna ( $\pm 1$  Jam). Perjalanan dengan kapal perintis ke Pulau Miangas membutuhkan waktu sekitar 14 jam. Sedangkan jarak antara pulau Miangas dengan pulau Mindanau Filipina hanya 77 km. Pulau Miangas termasuk pulau-pulau kecil di

perbatasan Indonesia yang memiliki peran sangat penting. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional pasal 47 ayat 1 tahun 1982, negara kepulauan berhak menarik garis pangkal kepulauan (archipelagic baseline) sebagai dasar pengukuran wilayah perairan dari titik terluar pulau-pulaunya.

Dengan kata lain, pulau-pulau kecil ini turut menentukan batas-batas kedaulatan NKRI. Jika Pulau Miangas lepas, Indonesia akan kehilangan wilayah laut yang luas serta SDA yang ada di dalamnya. Selain itu, Pulau Miangas juga menjadi bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Melihat lokasinya Pulau Miangas memang terletak di Talaud Sulawesi Utara yang termasuk bagian dari wilayah Indonesia. Namun, dalam banyak aspek gaya hidup masyarakat lokal yang bekerja sebagai petani dan pemancing yang lebih banyak ke Filipina daripada ke Indonesia. Di Filipina, warga negara Indonesia dianggap sebagai orang migran. Masyarakat Miangas biasanya memperdagangkan ikan dengan orang Filipina yang menggunakan mata uang Peso, mereka mengumpulkan uang dari perdagangan ikan dan kelapa yang dijual ke wilayah terdekat dari Filipina.

Dalam perkembangan pasar perdagangan internasional, kegiatan perdagangan bebas masyarakat perbatasan hanya berlangsung pada tahun 1975 bersamaan dengan pelaksanaan Perjanjian Lintas Wilayah Perbatasan (Rahman, 2013). Kesepakatan ini memberikan batasan kepada masyarakat yang bertentangan dan tidak sesuai dengan budaya serta tradisi yang hidup di antara masyarakat perbatasan sejauh ini. Penerapan perjanjian di bidang ini akan sulit untuk dilakukan karena orang dihadapkan pada pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka atau untuk mematuhi peraturan yang dianggap tidak fleksibel bagi mereka. Masyarakat perbatasan menganggap peraturan Perbatasan Lintas Daerah sebagai tradisi yang membatasi, baik dalam perdagangan maupun lintas batas yang telah mereka lakukan sejauh ini dari generasi ke generasi (Danugroho, 2022).

Padahal, jarak Miangas dengan Dafau hanya 3 jam perjalanan dengan kapal nelayan tradisional, sedangkan jarak Miangas ke ibukota kabupaten Talaud, Melonguane, membutuhkan perjalanan minimal sehari semalam. Warga Miangas yang dulu bertransaksi dengan warga Filipina di tengah laut maupun di Dafau, kini tidak punya pembeli untuk ikan-ikan yang ditangkapnya. Melihat hal itu, tentu saja masyarakat lebih dominan memilih untuk melanjutkan tradisi mereka guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan melakukan perdagangan bebas dan menyeberangi perbatasan secara diam-diam, daripada mematuhi peraturan yang tidak mengakomodasi kepentingan mereka (Omar, 2004).

Pembuatan kebijakan publik merupakan bagian penting dari sebuah pemerintahan. Oleh karena itu, kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting untuk terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan sesuai. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sebuah kebijakan lahir dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, akan tetapi pada masalah kali ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perikanan Indonesia mengenai penangkapan serta penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia secara illegal, yang mana kebijakan tersebut dianggap kurang dalam pertimbangan sehingga menyebabkan adanya dampak negatif terhadap WNI di General Santos, Filipina Selatan.

Konsep illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah. Kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, serta aktivitasnya tidak dilaporkan pada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang sudah



tersedia. IUU Fishing dapat terjadi disemua kegiatan perikanan tangkap tanpa bergantung pada lokasi, target spesies, alat tangkap yang digunakan, serta hasil yang diperoleh (Wei et al., 2022). Dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil maupun besar, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional. Konsep ini menjadi salah satu ancaman bagi ekosistem karena memiliki kekuatan untuk merusak upaya nasional dan regional dalam mengelola perikanan secara berkelanjutan serta untuk melestarikan upaya keanekaragaman hayati.

Konsep ini telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia. Namun, penertiban tersebut hanya di fokuskan untuk kapal-kapal besar Filipina yang melaut di perairan Indonesia. IUU Fishing mengambil keuntungan dari rezim manajemen yang lemah, khususnya kepada mereka yang berada di negara berkembang yang kekurangan kapasitas dan sumber daya untuk pemantauan, serta pengawasan. IUU Fishing dapat dilihat dari segala aspek kegiatan perikanan, itu menyangkut semua aspek serta tahap penangkapan dan pemanfaatan ikan, dan terkadang dapat dikaitkan dengan kejahatan berencana. Maka dari itu, maraknya 8 aktivitas kejahatan yang terjadi di wilayah kelautan Indonesia karena minimnya keamanan serta banyaknya para nelayan asing yang bebas keluar masuk di laut wilayah Indonesia. Dari sini timbul kebijakan pemerintah yang mana menangkap serta menenggelamkan kapal-kapal asing yang beraktivitas di perairan Indonesia.

Area penangkapan ikan di Filipina semakin berkurang dan melihat Fishing Ground di wilayah perairan Indonesia yang masih berkembang pesat, maka negara Filipina yang awalnya disebut sebagai pengeksport tuna terbesar se-Asia harus menjaga kuantitas dari pasokan ikan di negaranya dan hal tersebut yang mendorong nelayan Filipina sampai masuk di perairan Indonesia (Stevens et al., 2000). Fenomena IUU Fishing menjadi perhatian dunia karena dampak yang ditimbulkan sangatlah merugikan negara – negara di dunia termasuk Indonesia. Jika dilihat dampaknya secara umum yaitu ancaman bagi ekosistem atau SDA, hal ini bisa merambat ke banyak sektor contohnya para nelayan lokal akan kalah saing karena stok ikan yang seharusnya mereka tangkap sudah habis, kemudian mereka kalah saing dengan pelaku pencurian ikan yang menggunakan kapal besar saat mengambil ikan sehingga membuat salah satu faktor penyebab terjadinya Over Fishing.

Dalam bidang pertahanan keamanan, telah tersedia Polsek, pos TNI AD, dan pos TNI AL yang memiliki personel memadai untuk menjaga keamanan pulau. Kondisi kesejahteraan semakin sulit setelah jalur pelayaran Miangas Dafau (Filipina), baik formal maupun tradisional, dilarang beroperasi oleh pemerintah pada tahun 2005. Sekarang, Indonesia dan Filipina sudah memperkuat kerja sama dan keamanan perairan di wilayah perbatasan, yang dibuktikan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dengan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Bogor. Jokowi dan Ferdinand sepakat untuk terus mengamati kembali dua perjanjian pengamanan perbatasan, yaitu revised border crossing agreement dan order patrol agreement.

Selain dua perjanjian tersebut, Jokowi juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan, yang ditandatangani Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Senior Undersecretary Department of National Defense Filipina Jose C. Faustino. Dalam nota kesepahaman tersebut, kedua negara menuntut penguatan keselamatan dan keamanan perairan di wilayah perbatasan.

Jokowi juga menyebutkan 5 aspek yang dibahas dengan Ferdinand, yakni peningkatan potensi di bidang perdagangan, kerja sama infrastruktur dan industri strategis dengan BUMN, kerja sama perbatasan, keselamatan perairan di wilayah perbatasan, serta penguatan sentralitas kawasan ASEAN.

### **Jenis dan Upaya Penyelesaian Disintegrasi Bangsa**

Dalam menjalankan kehidupan, tentu tidak bisa lepas dari yang namanya perubahan. Dari perubahan yang terjadi ada yang bisa menerimanya dengan lapang dada, tapi tidak sedikit juga yang menolak sampai ingin melakukan tindakan yang anarkis. Hal ini bisa memicu timbulnya permasalahan yang dinamakan disintegrasi (Koentjaraningrat, 2004). Disintegrasi ini bisa terjadi baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup bernegara (Bangun, 2012). Seperti contoh orang atau sekelompok orang yang biasanya tergabung dalam sebuah organisasi menolak sebuah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah (Rozikin, 2019). Mereka bahkan secara terang-terangan menolak sebuah perubahan tersebut. Selain itu, muncul gerakan atau tindakan-tindakan yang di dalamnya berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa (Santoso, 2013). Maka dari itu, sangat penting adanya tindakan pencegahan agar tidak sampai menimbulkan permasalahan yang semakin rumit dan berkelanjutan.

Sebenarnya disintegrasi juga bisa disebut dengan konflik. Jadi, disintegrasi bangsa yaitu sebuah konflik yang terjadi dalam lingkup suatu bangsa. Salah satu contoh dari disintegrasi bangsa yang terjadi di Indonesia adalah kerusuhan pada 22 Mei yang mana massa menolak hasil keputusan KPU tentang kemenangan salah satu pasangan calon. Perbedaan pendapat yang terjadi tersebut tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Selain itu, kedua pihak juga tidak memiliki sifat rela untuk bisa menerima pendapat dari orang lain. Salah satu contoh disintegrasi atau konflik horizontal yang terjadi adalah kerusuhan yang ada di Poso dan juga Sampit. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kerusuhan tersebut, khususnya di Sampit sangatlah menyeramkan dimana banyak sekali korban yang meninggal dunia. Selain itu, konflik horizontal yang lebih sederhana dan mungkin kita pernah mengalaminya yaitu konflik yang terjadi antara pendukung kesebelasan. Kerusuhan ini biasanya karena adanya persaingan dari kedua klub yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Lalu bagaimana upaya pencegahan disintegrasi bangsa? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah disintegrasi bangsa tidak sampai terjadi

a. Memberikan pemahaman tentang patriotism

Masyarakat harus mempunyai jiwa patriotisme atau cinta terhadap tanah air. Masyarakat harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih utamadibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Rasa cinta tanah air, rasa persaudaraan, dan jiwa Pancasila sudah harus ditanamkan oleh setiap individu. Kita harus sadar bahwa bagaimana pun keadaannya, Indonesia harus tetap menjadi negara yang bersatu. Istilah ini biasanya dislogankan sebagai “NKRI Harga Mati”. Lalu bagaimana jika ada keputusan yang tidak pro rakyat? Jalan yang dilakukan adalah dengan bermusyawarah melalui lembaga-lembaga yang memang bertugas sebagai pihak penengah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan begitu, sikap dan tindakan yang dilakukan berdasarkan dengan argumentasi. Hal ini akan mencegah terjadinya disintegrasi bangsa yang dapat merugikan semua pihak.

b. Menghilangkan hal-hal yang berbau primodalisme

Primodalisme adalah sebuah pandangan atau sikap yang memegang kuat hal-hal yang sudah dibawa sejak kecil. Hal-hal tersebut bisa berhubungan dengan tradisi, kepercayaan, adat-istiadat, dan lain sebagainya. Semua orang harus mulai meninggalkan primodalisme sempit yang bisa mempengaruhi keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, tindakan lainnya yang berhubungan serta berpotensi menimbulkan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) juga harus ditinggalkan. Ketiga hal juga bisa memicu munculnya rasa tidakpercayaan masyarakat dan membuat masyarakat melakukan perlawanan yang akhirnya mengakibatkan disintegrasi bangsa.

- c. Rakyat harus punya sikap selektif  
Dengan berkembangnya dunia komunikasi yang semakin maju saat ini, berita sangat mudah dan cepat menyebar melalui media sosial. Muncul pihak-pihak yang berusaha untuk memecah belah bangsa dengan membawa isu yang sensitif, seperti agama. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih cerdas dan selektif dalam membaca dan memilih berita yang muncul atau sedang viral. Tidak semua berita yang viral terbukti benar adanya. Masyarakat harus pandai melihat kebenaran dari berita atau isu yang dimunculkan oleh berbagai akun di media sosial. Dengan begitu, mereka tidak akan mudah termakan isu yang belum tentu benar adanya tersebut.
- d. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat  
Upaya mencegah disintegrasi juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sekarang ini rasa percaya masyarakat menurun terhadap lembaga-lembaga yang sebelumnya dinilai masyarakat memiliki kredibilitas yang baik. Lalu bagaimana cara mengembalikan rasa percaya masyarakat lagi? Pemerintah harus mampu membangun kepercayaan mereka dengan penjelasan dan berbagai bukti yang dilakukan.
- e. Melawan berbagai gerakan separatis  
Pemerintah juga harus melawan berbagai gerakan separatis yang muncul dan dapat mengganggu kenyamanan negara. Tentu hal ini juga harus diimbangi dengan keterlibatan masyarakat di dalam mengakses berita tersebut. Pemerintah harus menjelaskan secara jelas mengenai gerakan yang mereka lawan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Dengan begitu, disintegrasi bangsa dapat dengan mudah dicegah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa nasionalisme sebagai suatu penilaian atau evaluasi terhadap rasa cinta tanah air dan bangsa atas kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Implementasi dari sikap nasionalisme setidaknya diwujudkan melalui pemenuhan unsur-unsur nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah air dan bangsa, berpartisipasi dalam pembangunan, menegakkan hukum dan menjunjung keadilan sosial, memanfaatkan sumberdaya sekaligus berorientasi pada masa depan, berprestasi, mandiri dan bertanggung jawab dengan menghargai diri sendiri dan orang lain, serta siap berkompetisi dengan bangsa lain dan terlibat dalam kerjasama internasional. Nasionalisme yang ideal seperti ini akan mengantarkan warga negara sebagai orang-orang yang mempunyai kualitas psikologis

yang tinggi. Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks, akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih sehingga perlu penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum, keadilan, sosial budaya. Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan implikasi positif bagi masa depan daerah di Indonesia namun juga berpotensi untuk menciptakan mengentalnya heterogental dibidang SARA. Pertarungan elit politik yang diimplementasikan kepada penggalangan massa yang dapat menciptakan konflik horizontal maupun vertical harus dapat diantisipasi. Kepemimpinan dari elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah sangat menentukan meredamnya konflik pada skala dini. Namun pada skala kejadian diperlukan profesionalisme aparat kewanitaan secara terpadu. Efek global, regional dengan faham demokrasi yang bergulir saat ini perlu diantisipasi dengan penghayatan wawasan kebangsaan melalui edukasi dan sosialisasi. Kita harus menyadari betapa sulitnya untuk mencapai dan mendapatkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara diamanahkan dan dituntut untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI meskipun berbagai ancaman dan gangguan datang menghampiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, E. I. (2015). Islam dan Dakwah: Sebuah Kajian Antropologi Agama. *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2).
- Ash-shidiqqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 2(1).
- Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of Law Dalam Perspektif Critical Legal Studies. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 3(1).
- Bahri, S. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Sekolah. *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga.
- Danugroho, A. (2020). Eksistensi Tradisi Masyarakat Samin Kabupaten Bojonegoro di Era Modern. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.31540/sindang.v2i1.289>
- Danugroho, A. (2022). *Pendidikan Dalam Kacamata Ketahanan Nasional*. Jejak Pustaka. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fxekEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:dVYInGoxxMJ:scholar.google.com/&ots=naTGry9tUy&sig=SwrM6F8bIxRxAIqq5IH8Q\\_U8TIM](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=fxekEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=related:dVYInGoxxMJ:scholar.google.com/&ots=naTGry9tUy&sig=SwrM6F8bIxRxAIqq5IH8Q_U8TIM)
- Darmodihardjo, D., & Santiaji. (1981). *Pancasila*. Usaha Nasional.
- Fisher, S., & et al. (2000). *Working with Conflict*. Zed Books Ltd.
- Głąb, K. M. (2018). History discourses and reconciliation process in post-Suharto Indonesia. *Sprawy Narodowościowe*, 50, 1–14. <https://doi.org/10.11649/sn.1648>
- Haboddin, M., & Rahman, F. (2013). *Gurita Korupsi Pemerintah Daerah*. Kaukaba.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyo, J., & Sigyanto, A. (2015). Ketahanan Dan Kemandirian Pangan Rumah Tangga Tani Daerah Marginal Di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Agro Ekonomi*, 26(2).
- Omar, M. T. Y. (2004). *Islam & Dakwah*. Zakia Islami Press.
- Rahman. (2013). Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Wilayah Perbatasan Pendekatan Human Security Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Wilayah Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, XIX(April), 32–46.
- Rahmatullah, A. S. (2017). Pendidikan Keluarga Seimbang Yang Melekat Sebagai Basis Yang

- Mencerahkan Anak Di Era Digital. *Cendekia*, 15(2).
- Rozikin, M. (2019). Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 25(2).
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).
- Saryani. (2013). Pariwisata dan Ketahanan Sosial Budaya. *JURNAL KETAHANAN NASIONAL*, XIX(April), 47–55.
- Stevens, J. D., Bonfil, R., Dulvy, N. K., & Walker, P. A. (2000). The effects of fishing on sharks, rays, and chimaeras (chondrichthyans), and the implications for marine ecosystems. *ICES Journal of Marine Science*, 57.
- Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wei, Z., Chai, J., Dong, J., & Lu, Q. (2022). Understanding the linkage-dependence structure between oil and gas markets: A new perspective. *Energy*, 257, 124755. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.energy.2022.124755>
- Widiatmoko, S., & Fahmi, A. (2017). Pemaknaan Ulang Terhadap Peringatantrage di Nasional 65 Dan Upaya Rekonsiliasi Di Tingkat Daerah. *Efektor Jurnal*, 49–56. <http://ojs.unpkediri.ac.id>